

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan ini peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi SIMPEL DESA (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa) sebagai berikut:

1. Abdul Shomad, (2018) Implementasi sistem informasi manajemen desa bagi pemerintahan desa adalah suatu keniscayaan. Kewajiban untuk menerapkan sistem informasi desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejatinya, sistem informasi desa memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses data desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaksanaan roda pemerintahan, program dan anggaran desa menjadi transparan. Pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan pun menjadi lebih akuntabel. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Kepala Desa atau Aparatur Desa dalam memahami Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan seberapa serius Kepala Desa atau Aparatur Desa mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Penelitian ini menerapkan mix-methods/gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan perolehan data melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan penerapan sistem informasi desa belum sepenuhnya optimal. Masih ada desa yang tidak memiliki data desa dan tidak memberi akses kepada masyarakat untuk melihat anggaran,

program kerja dan kebijakan desa lainnya.

2. Atmaja, (2022/2024) SIMPEL DESA sebagai Inovasi Smart Village di Desa Bantarjati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas penggunaan SIMPEL Desa selama 3 bulan, wawancara dengan aparatur desa dan perwakilan masyarakat, serta studi dokumentasi tentang perkembangan sistem sejak diluncurkan. Penelitian ini dilaporkan dalam Jaringan Inovasi Pemerintahan Nasional (JIPPNAS) Kementerian PANRB dan dipublikasikan ulang pada tahun (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEL Desa berhasil mengurangi waktu penyelesaian pelayanan administrasi hingga 70% misalnya pembuatan surat keterangan yang sebelumnya memakan waktu 3 hari kerja dapat diselesaikan dalam 1 jam. Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi data desa karena informasi terkait kependudukan, keuangan, dan pembangunan dapat diakses secara daring oleh masyarakat kapan saja. Implementasi aplikasi ini juga mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (2022) sebagai contoh sukses transformasi digital tata kelola desa di tingkat lokal
3. Selly Weliya Nada (2024) Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri Dana Desa adalah dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dengan kepala desa, bendahara desa dan badan pengawas desa, observasi di desa banjar negeri dan dokumentasi. Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknnin tipologi. Hasil dari penelitian ini adalah belum terealisasinya sistem transaksi non tunai terhadap pengelolaan dana desa di desa banjar negeri dikarenakan dari pemeritahan desa banjar negeri sendiri belum ada kesiapan dalam merealisasikan transaksi non tunai secara menyeluruh dalam transaksi belanja dan transaksi dana desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala desa banjar negeri bahwasannya di desa banjar negeri baru menerapkan transaksi non tunai pada pemberian gaji atau honor kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa.

4. Ir. Ahmad Fauzi, (2022) Tantangan Implementasi SIMPEL DESA di Wilayah Desa Tertinggal Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif, dengan teknik pengumpulan data melalui FGD dengan aparatur desa dari 15 desa di wilayah tertinggal Sumatera Selatan, wawancara mendalam dengan perwakilan masyarakat, serta observasi lapangan terhadap kondisi infrastruktur dan proses

penggunaan sistem. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi SIMPEL Desa menghadapi berbagai tantangan utama: hanya 25% aparatur desa yang mampu mengoperasikan seluruh fitur aplikasi akibat minimnya pelatihan berkelanjutan dan rendahnya literasi teknologi dasar; jaringan internet tidak stabil di 70% desa penelitian sehingga proses pengiriman dan pembaruan data sering gagal atau terlambat; serta sebagian besar masyarakat usia di atas 50 tahun lebih memilih sistem manual karena kesulitan dalam mengakses dan memahami platform digital. Kondisi ini menyebabkan sistem tidak dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat secara merata dan masih banyak aspek pelayanan yang belum tercover dengan baik.

5. Suranto, (2018) Aplikasi Sistem Informasi Desa (“Sifordes”) berbasis android dalam program desa mandiri informasi di Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Evaluasi ini menggunakan model CIPP. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang perangkat desa, tiga orang pengurus lembaga desa, dan dua orang warga masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian mengungkap: (1) Konteks yang terdiri atas tujuan, kebutuhan, dan kebijakan dalam program mandiri informasi berada dalam kategori baik; (2) Input program berupa kesiapan SDM, sarana dan prasarana, dan konten informasi mendukung dalam mengimplementasikan program desa

mandiri informasi; (3) Proses pelaksanaan program desa mandiri informasi berjalan sesuai rencana; dan (4) Produk program ini adalah terjadinya peningkatan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.

B. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

Woodrow Wilson (1887) Administrasi publik adalah bagian dari pemerintahan yang berada di luar fungsi pembuatan kebijakan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat kebijakan. Wilson membedakan antara "politik" (pembuatan kebijakan) dan "administrasi" (pelaksanaan kebijakan).

Herbert A. Simon (1947) mengatakan bahwa Administrasi publik bukan sekadar pelaksanaan kebijakan, melainkan juga mencakup proses pengambilan keputusan yang rasional dalam berbagai tingkatan organisasi pemerintah. Simon menolak pemisahan ketat antara politik dan administrasi, karena keputusan dalam administrasi juga memiliki unsur politik.

World Bank, (1992) *Good Government* adalah sistem pemerintahan yang meliputi kualitas tata kelola negara (*governance*), yang mencakup empat dimensi utama: kemampuan negara untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif, kredibilitas negara dalam memelihara aturan hukum, tanggung jawab publik terhadap masyarakat,

dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Francis Fukuyama (2013) *Good Government* adalah kemampuan negara untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik, serta memberikan layanan dasar kepada masyarakat tanpa korupsi, dengan efisiensi, dan sesuai dengan hukum. Fukuyama menekankan tiga elemen inti: kapasitas negara yang kuat, hukum yang adil dan diterapkan secara merata, dan akuntabilitas kepada masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Edy Suharto, 2005) Kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya), karena kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang

dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Easton (1969) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Artinya, kebijakan publik adalah proses distribusi nilai oleh pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai keputusan politik yang mengikat semua pihak.

Robert Eyestone (1971) Kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Artinya, kebijakan publik tidak hanya berbentuk keputusan formal, tetapi mencakup serangkaian aktivitas, program, atau tindakan yang menunjukkan keterkaitan pemerintah dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik.

3. Implementasi

Van Meter & Van Horn (1975) Implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Implementasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis, di mana kebijakan yang telah dirumuskan diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan secara efektif dalam bentuk program, kegiatan, dan prosedur yang dapat dijalankan oleh pelaksana kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (2012) Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi bukan hanya sebatas menjalankan perintah, melainkan juga mengandung unsur interpretasi, penyesuaian, serta kemampuan pelaksana dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan.

Mazmanian & Sabatier (1983) Implementasi ialah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum yang dapat berbentuk perintah, keputusan, maupun ketetapan pengadilan. Proses implementasi merupakan serangkaian tindakan yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang konkret di lapangan. Mereka menekankan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh tiga hal penting: kejelasan tujuan kebijakan, ketepatan instrumen yang digunakan, dan kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial-politik yang ada.

Nurdin Usman (2002) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan yang dilaksanakan melalui mekanisme sistem tertentu. Implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan matang dan diarahkan untuk mencapai tujuan kegiatan secara efektif. Dalam hal ini, implementasi membutuhkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III menambahkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III (Agustino, 2014), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (Agustino, 2008) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten komunikasi atau pertransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau

digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

- a) Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implemenentasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi).hal tersebut disediakan karena komunikasi telah melalui beberapa ungkatan birokras, sehingga apa yang diharapkan lerdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-burcucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu. par pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada talaran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi perintah yang diberikan dalam Pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan), Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.

2) Sumber Daya

Variabel alatl laktor yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan, implementasi suatu kebijakan adalah sumber adanya. Sumber Daya merupakan hal penting lainnya. Menurut George C Edward

III (Agustino, 2008) mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a) Staf sumber daya utama dalam impemenlasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementasi harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang pada umumnya kewenangan harus formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasal bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil. Maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses

implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan melihat dalam efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas-fasilitas fisik juga merupakan faktor-faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III Agustino (2008), adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting. Ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C: Edvard III, adalah:

- a) Pengangkatan birokrat: disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
 - b) Insentif Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang yang menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal-hal dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi
- 4) Struktur Birokrasi

Variabel keempat menurut Edward III (Agustino, 2008), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan satu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dan

struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; Dua karakteristik, menurut Edward III, yang mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

- a) Standard Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kebijakan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrasi/ birokrasi) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hanya sesuai dengan standar yang diharapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

4. Sumber Daya

Pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya teknologi. Dalam konteks pemerintahan desa, sumber daya menjadi

unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program, kebijakan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai komponen dari ekosistem sosial dan ekonomi yang berfungsi menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya sumber daya yang memadai, kegiatan pembangunan desa dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penerapan Simpel Desa (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa), ketersediaan dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi sistem tersebut. Sistem informasi seperti Simpel Desa membutuhkan dukungan berbagai sumber daya, mulai dari perangkat keras dan lunak, tenaga operator yang memiliki kompetensi teknologi informasi, hingga dukungan keuangan dan kebijakan dari pemerintah desa. Tanpa sumber daya yang cukup, sistem informasi tidak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga manfaatnya bagi masyarakat pun menjadi terbatas.

Adam Smith (1776) dalam bukunya “Wealth of Nations” (1776), sumber daya merupakan seluruh faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output dalam proses ekonomi. Adam Smith memandang bahwa sumber daya bukan hanya terbatas pada kekayaan alam, melainkan juga meliputi tenaga kerja manusia, modal, dan tanah sebagai faktor produksi utama. Dalam konteks implementasi Simpel Desa, pandangan Adam Smith relevan karena menunjukkan pentingnya

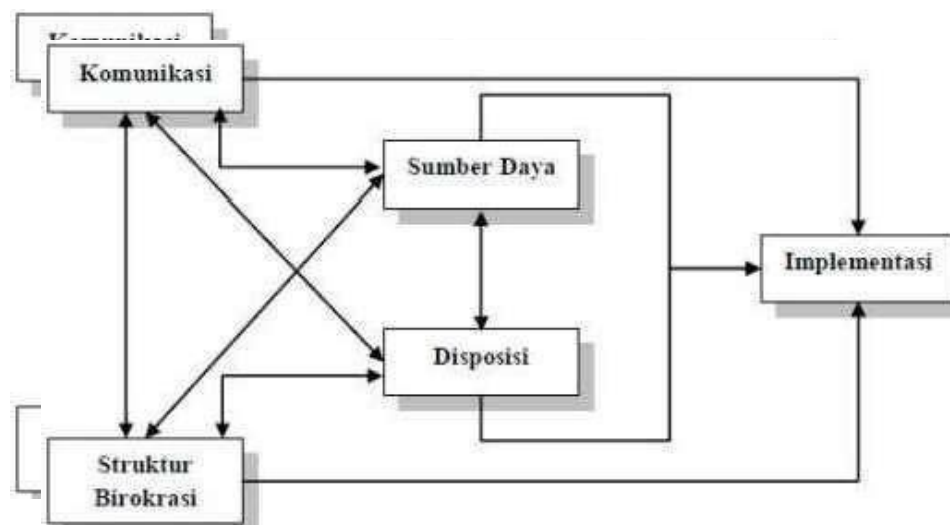
pemanfaatan seluruh faktor produksi untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah desa perlu mengelola sumber daya manusia, teknologi, dan finansial secara efisien agar proses administrasi dan pelayanan berbasis digital dapat memberikan output berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Rees (1990) sesuatu dapat dikatakan sebagai sumber daya apabila memenuhi dua kriteria, yaitu: (1) adanya pengetahuan, teknologi, atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya, dan (2) adanya permintaan (demand) terhadap hal tersebut. Artinya, sumber daya tidak hanya sebatas ada secara fisik, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh pihak lain. Dalam implementasi aplikasi Simpel Desa, pandangan Rees sangat relevan. Aplikasi tersebut tidak akan bermanfaat tanpa adanya kemampuan pengguna (aparatur desa) yang memahami teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya manusia di desa harus memiliki knowledge dan skill dalam mengoperasikan sistem informasi agar manfaat dari Simpel Desa dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan menjadi demand yang mendorong pemanfaatan sistem ini secara berkelanjutan.

Grima dan Berkes (1989), sumber daya dapat didefinisikan sebagai aset yang digunakan untuk memenuhi kepuasan dan utilitas manusia. Dalam perspektif ini, sumber daya bukan hanya sesuatu yang bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya karena dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi Simpel Desa dapat dianggap sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya teknologi informasi sebagai aset desa. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan administrasi, seperti surat keterangan, data kependudukan, hingga informasi keuangan desa. Selain itu, aplikasi tersebut juga membantu aparatur desa dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan yang lebih akurat, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Gambar 1. Model Pendekatan *direc and indirect impact on implementation* (Geogre Edward III)



(Sumber : Agustino, (2008))

a) Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan public implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (Nugruho (2008)) beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang

mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
 - 2) Karakteristik agen pelaksana atau implementor,
 - 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
 - 4) Kecenderungan (dispositon) pelaksanaan dan implement
- b) Implementasi kebijakan publik Donald Van Meter dan Calr Van Hom

Implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter dan Calr Van Hom (Agustino, 2014) terdapat 6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultuir yang berada di level pelaksana kebijakan, Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal bahkan teralu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memeng merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dilaksanakan berhasil.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tapah tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuju adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetisi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang berkompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van, Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplentasikan kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah prilaku atau tidak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Sedangkan bila kebijakan publik ini tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

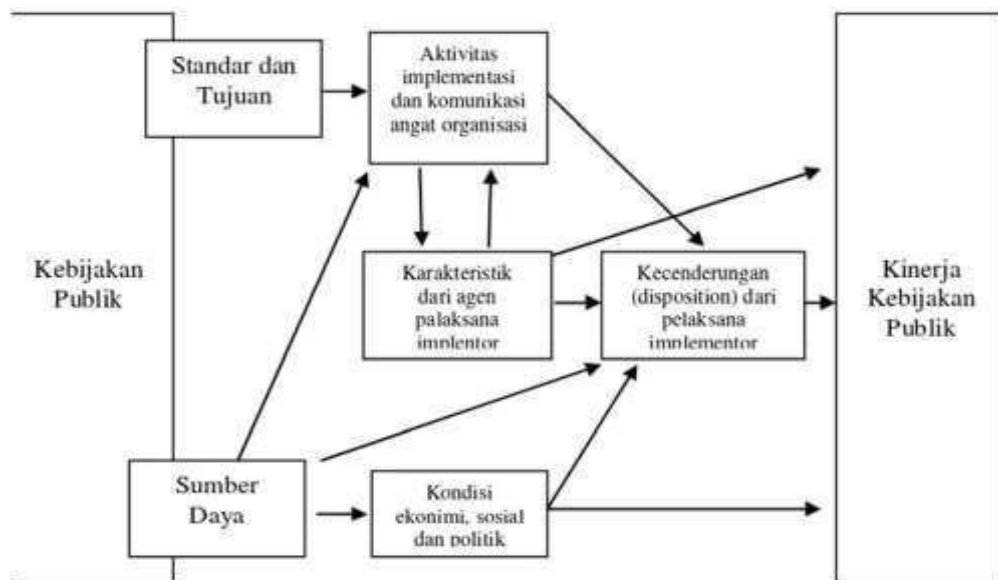
5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam Implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal

Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Publik *Donald Van Meter* dan *Van Horn*



(Sumber : Agustino, (2014))

c) Model Implementasi Kebijakan Merline S. Grindle

Model Marlie S.Grindle (Subarsono, 2005) terdapat dua variable besar yang mempengaruhi implementasi kcbijakan yaitu isi kebijakan

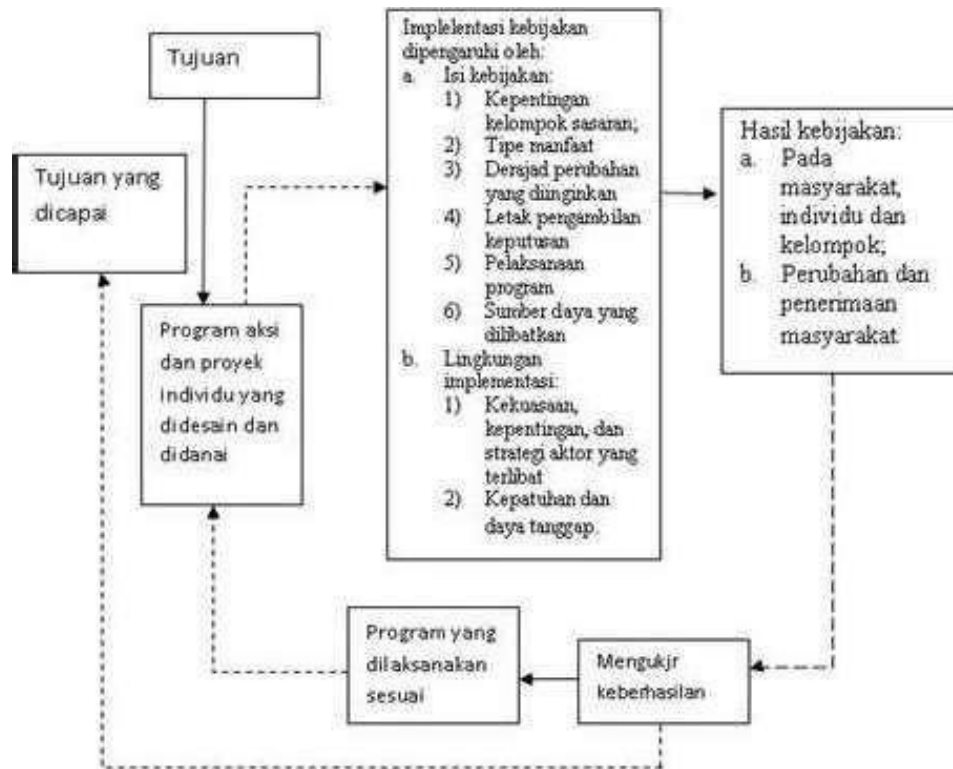
(*content of polic*) dan lingkungan implementasi (*context of implement*).

Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan oleh (Subarsono 2005), variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target grup,
- 3) Sejauh mana perubahan program sudah tepat
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat
- 5) Apakah sebuah kebijakan implementasinya dengan rinci, telah menyebutkan implementasinya secara rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai,

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup;

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
- 4) Keunikan dan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Publik *Merilee S.Grindle*

(Sumber : Subarsono (2005))

Dari ketiga model implementasi kebijakan tersebut, peneliti memiliki menggunakan model implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Agustino, karena lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam judul yang peneliti angkat yaitu "Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SIMPEL. DESA)" di Kantor Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara". Terdapat aspek yang sesuai antara model implementasi dengan masalah yang peneliti temukan khususnya yang terdapat GAP pada aspek sumber daya pada indikator staf informasi, wewenang dan fasilitas.

C. Pengertian Aplikasi

Kadir, (2008) aplikasi adalah sebuah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi penggunanya. Aplikasi juga diartikan sebagai penerapan atau penggunaan konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu;

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
2. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

Jogiyanto (1904), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (intruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

D. Pengertian Sistem

Marimin, (2013) Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dan bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.

Hanif AI Fatta (2013), Definisi sistem dalam kamus, Webster's Unbrigid adalah elemen elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi.

Jogiyanto (2005), Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki batasan yang jelas yang membedakannya dengan lingkungannya, dan terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem dapat di terapkan pada berbagai bidang, seperti teknologi bisnis, ilmu alam, dan lainnya.

E. Pengertian Sistem Informasi

Alter Kadir (2003), sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Budi Sutedjo Dharma (ketomo (2002), sistem informasi sebagai kumpulan elemen yang saling satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.

Sutabin (2005), sisten informasi adalah suatu sistem dari 2005, 30lymasi yang mempertajukung kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat mcnyediakan informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Dengan demikian, sistem informasi dapat digunakan untuk

mendukung proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimanfaatkan untuk mengubah seluruh proses administrasi, pengelolaan data, layanan publik, hingga pengadaan barang dan jasa menjadi sistem digital yang terpadu, terintegrasi, dan memiliki kekuatan hukum sah, dengan tujuan utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menjamin keakuratan, keamanan, dan ketersediaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan integrasi antar instansi pemerintahan hingga ke tingkat desa.

F. Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SIMPEL DESA) merupakan salah satu inovasi teknologi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas administrasi desa menjadi satu platform terpadu. Di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, aplikasi ini telah diimplementasikan untuk mengelola berbagai aspek kerja desa, antara lain:

1. Proses Pelaporan: Mulai dari pengisian data kependudukan, pencatatan transaksi keuangan desa, hingga pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa (LPJ). Secara manual, proses pelaporan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan menggunakan buku besar fisik, formulir kertas, dan pencatatan yang rawan kesalahan. Setelah

penerapan SIMPEL DESA secara digital, pelaporan dilakukan melalui input data langsung ke sistem, di mana data akan secara otomatis terintegrasi dan dapat diakses secara real-time. LPJ pun dapat dihasilkan dengan cepat melalui fitur generate laporan yang tersedia, sehingga mempercepat proses verifikasi dan pertanggung jawaban.

2. Proses Pelayanan: Meliputi pembuatan surat keterangan (kelahiran, kematian, domisili), pendaftaran program bantuan sosial, dan permohonan izin terkait desa. Secara manual, masyarakat harus datang ke kantor desa berulang kali, mengisi formulir fisik, dan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan layanan. Dengan SIMPEL DESA, sebagian layanan dapat diakses secara daring atau masyarakat hanya perlu mengajukan permohonan sekali dengan data yang tersimpan dalam sistem, sehingga waktu pelayanan berkurang secara signifikan. Perbandingan proses kerja sebelum dan sesudah penerapan SIMPEL DESA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Kerja Desa Proses Manual Proses Digital (SIMPEL DESA)

Aspek Kerja Desa	Proses Manual	Proses Digital (SIMPEL DESA)
Pelaporan LPJ	- Menggunakan buku besar dan formular kertas - Waktu penyusunan 2-3 bulan - Rawan kesalahan pencatata - Verifikasi dilakukan secara manual	- Input data langsung ke sistem - Waktu penyusunan 1-2 minggu - Data terintegrasi dan otomatis terhitung - Verifikasi dapat dilakukan secara daring
Pelayanan Surat Keterangan	- Membawa berkas fisik - Mengisi formular berulang kali - Waktu tunggu 3-5 hari kerja	- Berkas tersimpan dalam database desa - Pengisian data hanya sekali - Waktu tunggu 1 hari kerja atau lebih cepat
Pengelolaan Data Penduduk	- Data tersimpan dalam buku induk penduduk fisik - Sulit melakukan pembaruan dan pencarian data - Rawan kehilangan atau kerusakan dokumen	- Data tersimpan dalam database digital - Pembaruan dan pencarian data secara cepat - Data aman dan dapat di backup secara berkala

Sumber : Pemerintah Desa Bararawa Operator SIMPEL DESA

G. Pengertian Manajemen

(Naidah 2009), Manajemen sering diartikan sebagai ilmu dan seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui kegiatan orang lain. Salah satu definisi yang cukup jelas dan banyak digunakan orang adalah sebagaimana yang kemukakan oleh Mary Parker Pollet (2002) bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dengan upaya anggota organisasi, untuk menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan target. Pada umumnya semua kegiatan dalam pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan tujuan dijalankannya internal control, kalau menurut R. Soemita Adikoesumah, Azas-Azas Manajemen (2000), mengemukakan tujuan internal control, sebagai berikut :

1. Membantu manajemen dalam pelaksanaan administrasi pada perusahaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan prosedur untuk menentukan kebijaksanaan kerja organisasi.
2. Memberi tahukan dan bila perlu membetulkan cara kerjanya agar lebih efektif dan efisien.

H. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Yakub (2012) dalam (Kaleb, Lengkong, and Taroreh 2019), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang

sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang dan informasi. sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen.

Hartono (2013) Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan.

Syampurnajaya (2000), Sistem Informasi merupakan aliran data, transaksi dan kegiatan dari suatu organisasi yang berfokus pada kualitas, waktu pengembangan, fleksibilitas, biaya dan perawatan piranti lunak (software). Teknologi Informasi (TI) merupakan kebijakan standard infrastruktur seperti piranti keras (hardware) dan jaringan networking. TI lebih berfokus pada kemampuan, merespon kemudahan dan rasio biaya/performansi, sedangkan Manajemen Informasi (MI) lebih berfokus pada penggunaan, kualitas dan integrasi dari informasi. Oleh karena itu SI, TI dan MI yang diperlukan oleh manajemen yang di sebut “Sistem Informasi Manajemen (SIM)”, dimana memiliki komponen-komponen sebagai berikut: piranti keras, piranti lunak, data jaringan, sumber daya manusia dan prosedur.

Davis (1995), Sistem Informasi Manajemen (SIM) mengemukakan bahwa sistem informasi yang selain melakukan semua transaksi yang

dipelukan oleh sesebuah organisasi, juga memberi dukungan informasi dan mengeloh untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam membahas sistem informasi tidak bisa dipisahkan dengan Teknologi Informasi, oleh karena itu Syampurnajaya (2000) mebahas menjadi tiga kategori sebagai komponen utama, yaitu:

1. Piranti Keras (Hardware), teknologi “mainframe” merupakan suatu teknologi sentralisasi dimana tempat penyimpanan data di pusatkan disuatu tempat sehingga kontrol hanya terbatas pada suatu group dan devisi. Sedangkan teknologi “Client Server” menggunakan desentralisasi sehingga penyimpanan data tersebar di berbagai tempat. Saat ini banyak perusahaan dan organisasi yang beralih dari teknologi Mainframe ke teknologi Clieen Server sehingga banyak pengguna memanfaatkan PC (Personal Computer) yang memiliki konfigurasi yang rendah sebagai client dan mengambil serta mengelolah data dari PC lainnya sebagai server.
2. Piranti lunak (software), piranti lunak dibagi dalam tiga komponenn utama, yaitu:

- Sistem operasi piranti lunak,

Sistem operasi ini sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Dulu dikenal sistem operasi DOS, saat ini banyak sistem operasi yang dapat diperlukan, antarlain Microsoft mengeluarkan Windos XP, Windows Vista serta Windows 7.

IBM juga mengandalkan sistem informasi yaitu OS/2 kesemuanya tersebut dipergunakan untuk pemakai yang berbasis PC. Kriteria untuk sistem operasi yang berbasis PC yang diperlukan untuk dimasa mendatang adalah biaya yang relatif murah dalam penerapan serta dapat dimodifikasi oleh penggunanya.

- Aplikasi Piranti lunak

Organisasi dihadapkan pada dua pilihan yaitu mengembangkan aplikasi sendiri (Application development) dan membeli paket aplikasi (Application Package). Aplikasi Sendiri (Applicaton Development). Untuk mengembangkan/membuat aplikasi sendiri, diperlukan programer tertentu. Aplikasi Paket (application package), dalam menentukan atau pemilihan piranti lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pantas atau layak nya piranti lunak tersebut diterapkan berdasarkan pengalaman, referensi, pertimbangan organisasi, pelayanan dan tingkat produktifitas.

3. Telekomunikasi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat mengeliminasi hambatan letak maupun geografis dan waktu, sehingga perusahaan ataupun organisasi meningkatkan jasa dan produksinya, memperlancar kinerja, pengambilan keputusan, pengembangan segmentasi pasar yang lebih luas dan mudah dalam membina hubungan dengan kostumer. Sebagai contoh: Electronic Mail (Email), Fax-mail,

Voice Over Internet Protocol (VOIP), Teleconference, Waireless Application Protocol (WAP), dan Electronic Data Interchange (EDI).

I. Pengertian Aplikasi (SIMPEL DESA)

Aplikasi Simpel Desa kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa, adalah sistem informasi berbasis web dan Android, produk layanan digital dari PT Telkom Indonesia, yang dirancang khusus untuk pemerintahan desa, berfungsi mengelola administrasi, data penduduk, surat-menyurat, keuangan, aset, informasi publik, dan pembangunan secara terpadu, cepat, rapi, aman, dan sesuai aturan perundang-undangan desa.

Dadang Supriatna (2022), Simpel Desa adalah sistem berbasis awan yang mudah diakses warga melalui ponsel, berfungsi memudahkan pengurusan administrasi, pelayanan, usaha, serta sarana penyampaian aspirasi dan keluhan langsung ke pemerintah desa. Ini merupakan wujud nyata pemerintahan berbasis elektronik di tingkat desa.

James (2021), Simpel Desa merupakan gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan pangkalan data, yang bekerja bersama-sama mengubah data mentah menjadi informasi berguna, guna mendukung seluruh kegiatan operasional dan manajemen organisasi pemerintahan desa.

Husein & Wibowo (2024), Simpel Desa termasuk jenis sistem informasi terpadu, yaitu seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan segala data dan informasi desa, sebagai pendukung utama pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, serta pengawasan kinerja pemerintahan desa.

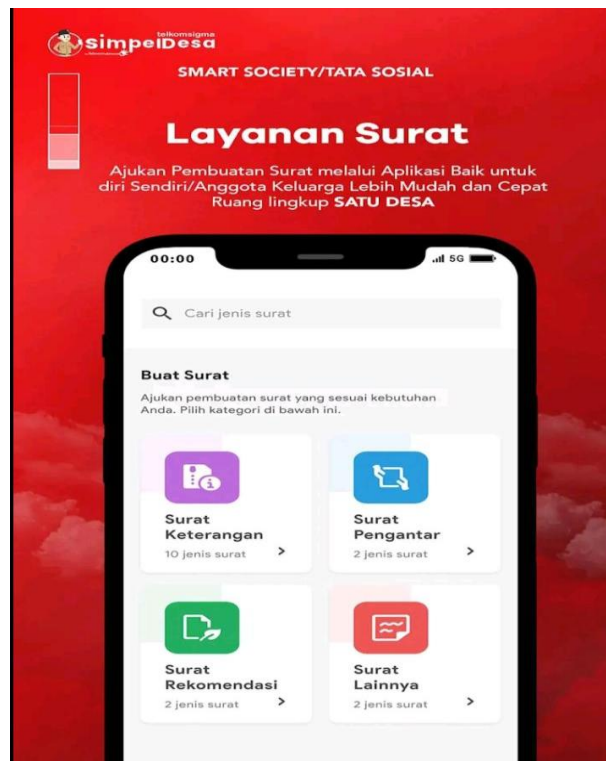
Gambar 4. Aplikasi (SIMPEL DESA)



J. Pengembangan Fitur Aplikasi SIMPEL DESA

a. Penambahan Fitur Layanan Surat-Menyurat

Gambar 5. Fitur Aplikasi (SIMPEL DESA)



Berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan pelayanan administrasi di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta masukan koreksi bahwa aplikasi harus memiliki fitur lengkap dan berjalan optimal saat diterapkan, maka dikembangkan fitur utama yaitu Layanan Surat-Menyurat Desa. Fitur ini dirancang untuk mengelola pembuatan, persetujuan, hingga pengarsipan seluruh dokumen administrasi yang paling sering diminta oleh warga maupun dibutuhkan oleh perangkat desa.

Berikut rincian jenis surat, alur kerja, dan format dokumen yang diterapkan di dalam aplikasi:

b. Daftar Jenis Surat yang Tersedia

Fitur ini menyediakan 5 jenis surat paling umum dan penting di Desa Bararawa, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Domisili
- 2) Surat Keterangan Pengantar
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu
- 4) Surat Keterangan Kelahiran / Kematian
- 5) Surat Izin Keramaian / Kegiatan

Setiap jenis surat memiliki format standar resmi sesuai peraturan administrasi pemerintahan desa, dan terintegrasi langsung dengan data kependudukan desa agar pembuatan surat menjadi cepat, akurat, dan tidak berulang memasukkan data.

c. Alur Kerja Fitur Surat-Menyurat

Agar aplikasi berjalan dengan baik dan terstruktur, alur kerja diatur sebagai berikut:

- 1) Pengisian Data → Admin desa memilih jenis surat, lalu sistem otomatis mengambil data warga dari basis data (Nama, NIK, Alamat, RT/RW Desa Bararawa), hanya mengisi keperluan surat saja.
 - 2) Pembuatan Dokumen → Sistem langsung menyusun surat lengkap dengan nomor surat, kode desa, tanggal terbit, dan format resmi.
 - 3) Persetujuan & Tanda Tangan → Dokumen dikirim ke menu Kepala Desa / Sekretaris Desa untuk persetujuan, dilengkapi fitur tanda tangan digital dan cap desa elektronik.
 - 4) Pencetakan & Unduhan → Surat yang sudah sah bisa dicetak langsung atau diunduh berformat PDF untuk dikirimkan secara digital.
 - 5) Pengarsipan Otomatis → Semua surat tersimpan dalam sistem, bisa dicari kapan saja berdasarkan nama, tanggal, atau jenis surat.
- d. Contoh Format Lengkap Surat di Aplikasi

Berikut adalah contoh format lengkap yang ditampilkan dan dicetak melalui aplikasi SIMPEL DESA, khusus untuk Surat Keterangan Kelahiran:

Gambar 6. Contoh Surat Keterangan Kelahiran

 **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**
KECAMATAN PAMINGGIR
DESA BARARAWA
Alamat : Jl. Kali Paminggir RT.001 Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Email : desabararawa@gmail.com Kode Pos 71133

SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
Nomor : 440/ 029/ DRW-PMG/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Kepala Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Menerangkan dengan Sesungguhnya Bahwa Telah Lahir Seorang Bayi Pada:

Hari ini	: Selasa
Tanggal	: 10 Oktober 2011
Pukul	: 09.30 WITA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Berat Badan	: 3 Kg
Panjang Badan	: 45 Cm
Anak Ke	: 1 (Satu)

Dan diberi nama : **AHMAD NAOVAL**

Ayah	: Tn. M. NOOR
Umur	: 37 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Bararawa RT.004 Kec. Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ibu	: Ny. NOOR ASIAH
Umur	: 32 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Bararawa RT.004 Kec. Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian Surat Keterangan ini buat dan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bararawa, 04 Mei 2026
Mengetahui
Plt. Kepala Desa Bararawa

MUHAMMAD LATIF

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

e. Jaminan Kinerja Aplikasi

Sesuai masukan koreksi bahwa “jika ada dipakai, aplikasinya harus berjalan dengan baik”, maka dalam pengembangan ini dilakukan pengujian sistem agar:

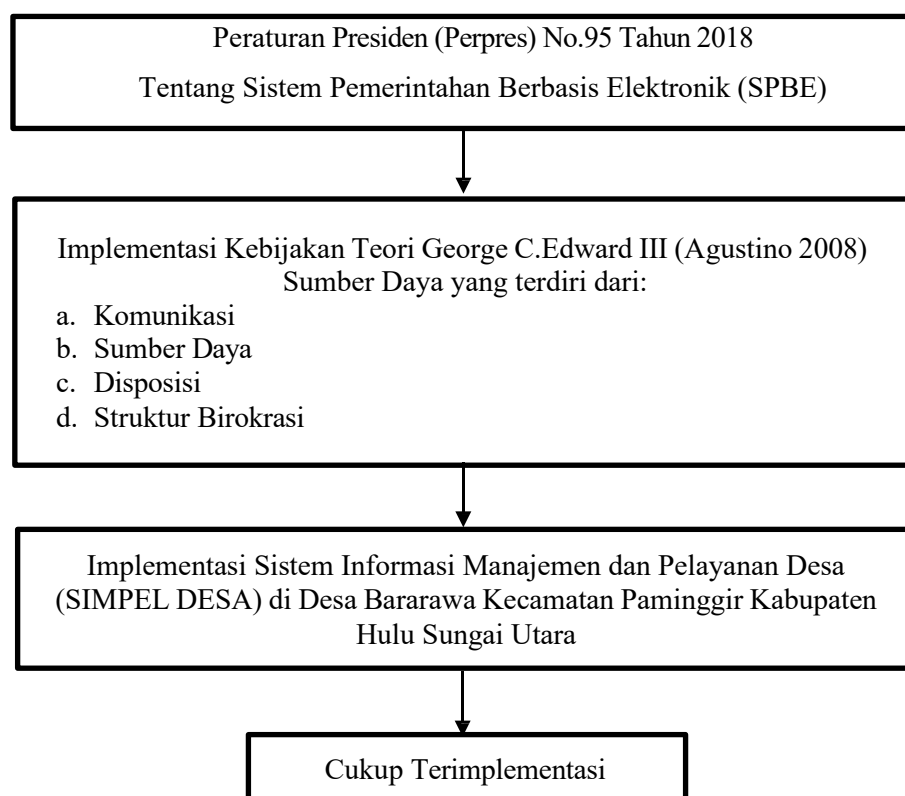
- 1) Seluruh fitur berfungsi tanpa gangguan, tidak ada kesalahan saat memproses data atau mencetak surat.
- 2) Data warga aman, tersimpan rapi, dan tidak hilang.
- 3) Sistem mudah dioperasikan oleh perangkat desa, tidak memerlukan keahlian teknis tinggi.

- 4) Bisa diakses kapan saja di kantor desa maupun melalui perangkat gawai, sehingga pelayanan ke warga menjadi lebih cepat dan efisien.

Dengan penambahan fitur ini, aplikasi SIMPEL DESA tidak hanya lengkap fiturnya, tapi juga siap diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi pengelolaan administrasi serta pelayanan warga di Desa Bararawa.

K. Kerangka Konseptual

Gambar 7. Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti 2026